

LAPORAN AKHIR
ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS JASA KONTRUKSI PADA PROYEK
PEMBANGUNAN GEDUNG POLITEKTIK STAN OLEH PT HUTAMA KARYA
(PERSERO) DIVISI GEDUNG



Disusun oleh:

Nama : Naufal Hafidh Al Aliyya

No. Mahasiswa : 18312247

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIRISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Hafidh Al Aliyya

NIM : 18312247

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul : Analisis Penerapan Pajak Atas Usaha Jasa Kontruksi Oleh PT. Hutama Karya
(Persero)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Magelang, 8 Februari 2022



Naufal Hafidh Al Aliyya

LAPORAN MAGANG
ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS JASA KONTRUKSI PADA PROYEK
PEMBANGUNAN GEDUNG POLITEKTIK STAN OLEH PT HUTAMA
KARYA (PERSERO) DIVISI GEDUNG

Dibuat oleh :

Naufal Hafidh Al Aliyya

NIM : 18312247

Diperiksa oleh :

Yogyakarta, 6 Februari 2022

Dosen Pembimbing



Rifqi Muhammad, SE., SH., MSc., Ph.D.,SAS

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG / WIRAUSAHA

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**Analisis Penerapan Pajak Atas Jasa Kontruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik
STAN Oleh PT. Hutama Karya (Persero) Divisi Gedung**

Disusun Oleh : Naufal Hafidh Al Aliyya

Nomor Mahasiswa : 18312247

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Rabu, 02 Maret 2022

Penguji/ Pembimbing TA : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.

Penguji : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan anugerah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan proposal magang ini yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak atas Jasa Kontruksi pada Proyek Pembangunan Gedung Politektik STAN oleh PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung”. Penulisan proposal magang ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan proposal magang ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan proposal magang ini;
- 2) PT Utama Karya (Persero) khususnya Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN Bintaro yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- 3) Kedua orang tua saya, Nurhayie El Alie dan Aan Nurhasanah yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan penulis tiada henti;
- 4) Ferry Krisna selaku *Site Administration Manager* yang membantu dalam memberikan data dan arahan selama pelaksanaan magang
- 5) Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga proposal magang ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal magang ini masih jauh dari kata sempurna.

Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Semoga proposal magang ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Magelang, 15 Januari 2022



Naufal Hafidh Al Aliyya

NIM 18312247



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR LAMPIRAN.....	7
Abstrak	8
BAB I PENDAHULUAN	1
2.1 Latar Belakang	1
2.2 Perumusan Masalah.....	2
2.3 Tujuan.....	2
2.4 Manfaat Magang.....	3
2.4.1 Bagi Mahasiswa.....	3
2.4.2 Bagi Perusahaan	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
3.1 Pengertian Pajak.....	4
3.2 Pengertian Pajak Penghasilan	4
3.3 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2.....	4
3.3.1 Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	4
3.3.2 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi	5
3.3.3 Tata cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	5
3.3.4 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	5
3.3.5 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	6
3.3.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	6

3.4	Pengertian Jasa Kontruksi.....	6
3.5	Kajian Terdahulu	7
BAB III METODE PENELITIAN		9
3.1	Jenis Penelitian.....	9
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	9
3.3	Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data.....	9
3.4	Metode dan Proses Analisis	10
BAB IV PELAKSANAAN		11
4.1	Profil Perusahaan (PT Utama Karya)	11
4.2	Aktivitas Magang	12
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		17
5.1	Analisis perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi.....	18
5.2	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	20
5.3	Analisis Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	21
5.4	Analisis Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi	21
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		23
6.1	Kesimpulan	23
6.2	Saran	24
Daftar Pustaka.....		26
Lampiran		28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Penerapan Pajak Sebelumnya	7
Tabel 2. Perhitungan DPP atas Proyek Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Gedung PKN STAN Bintaro	17
Tabel 3. Daftar Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Proyek Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Gedung PKN STAN Bintaro	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT. Utama Karya (Persero).....	28
Lampiran 2: Surat Perintah Membayar SPM) Termin 1	29
Lampiran 3: Surat Perintah Membayar SPM) Termin 2.....	30
Lampiran 4: Surat Perintah Membayar SPM) Termin 3.....	31
Lampiran 5: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka.....	32
Lampiran 6: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin 1	33
Lampiran 7: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin 2.....	34
Lampiran 8: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin 3.....	35
Lampiran 9: Surat Setoran Pajak (SSP) Uang Muka	36
Lampiran 10: Surat Setoran Pajak (SSP) Termin 1	38
Lampiran 11: Surat Setoran Pajak (SSP) Termin 2	39
Lampiran 12: Surat Setoran Pajak (SSP) Termin 3	41
Lampiran 13: Wawancara dengan Site Administration Manager (SAM).....	43
Lampiran 14: Flow Proses PPN dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2.....	46
Lampiran 15: CV	48

Abstrak

Menganalisis kesesuaian Penerapan Pajak atas Usaha Jasa Kontruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT. Utama Karya (Persero) Divisi Gedung merupakan tujuan penelitian ini yang meliputi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final dan PPN dengan Ketentuan Perpajakan. Dalam proses penelitian ini berlangsung dari September 2021 sampai dengan Desember 2021. Metode dalam mengumpulkan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Metode dalam menganalisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan membandingkan Penerapan Pajak atas Usaha Jasa Kontruksi oleh PT. Utama Karya (Persero) dengan Ketentuan Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Utama Karya (Persero) dalam Perhitungan tarif pajak sebesar 3% dimana perusahaan memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar telah sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009. Selain itu, Pemotongan dilaksanakan oleh pengguna jasa karena memiliki status sebagai Pemotong Pajak. Penyetoran dan Pelaporan Pajak juga dilaksanakan sebelum jatuh tempo yaitu sebelum bulan 10 bulan berikutnya untuk Penyetoran Pajak dan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya untuk Pelaporan Pajak sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009. Kesimpulan yang didapat bahwa Penerapan Pajak atas Usaha Jasa oleh PT. Utama Karya (Persero) yang meliputi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final dan PPN sudah sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.

Kata Kunci: Pajak dan Jasa Kontruksi

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Suatu bangsa yang dianggap mandiri yaitu ketika dapat melaksanakan dan membiayai sendiri pembangunannya. Pajak, bagi suatu negara merupakan salah satu sumber penghasilan utama untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahannya dan pembangunan dalam suatu negara. Oleh karena itu sangat penting bagi suatu negara untuk memaksimalkan penerimaannya melalui sektor pajak untuk memenuhi pengeluaran dalam hal menjalankan suatu negara.

Saat ini pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menuju untuk menjadi negara yang maju. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain meliputi pembangunan jalan, Gedung, jembatan dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya bisa dilakukan jasa konstruksi yang di bawah pemerintah maupun swasta. Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur ialah sebagai penunjang kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat antara lain seperti jalan tol, jembatan, saluran irigasi, Gedung pemerintahan, sekolah hingga jalan raya yang menjadi penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat.

Walaupun kegiatan konstruksi merupakan penunjang kehidupan dalam suatu negara. Hal itu tidak terlepas dari pemungutan pajak karena APBN setiap tahun sebagian besar dibiayai oleh sektor pajak. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, ekonomi dan stabilitas politik suatu negara berbanding lurus dengan meningkatnya pajak dalam suatu negara.

Disisi lain, suatu jasa konstruksi harus memastikan bahwa penerapan perpajakan dalam usaha jasa konstruksi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku apa belum karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 pajak penghasilan atas jasa konstruksi diatur secara khusus. Pajak yang dikenakan bersifat final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan.

Hingga saat ini belum ada penelitian yang membahas penerapan pajak atas jasa konstruksi khususnya Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 dengan objek penelitian PT.

Hutama Karya. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak atas Jasa Kontruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAK Oleh PT. Hutama Karya Divisi Gedung”** yaitu dengan menganalisis terkait penerapan perpajakan yang terdiri dari perhitungan pajak, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak dalam bidang kontruksi apakah sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku. Baik itu Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 maupun PPN.

2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang ada, yaitu :

1. Apakah Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang diterapkan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan?
2. Apakah Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang diterapkan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan?
3. Apakah Penyeteroran PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang diterapkan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan?
4. Apakah Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang diterapkan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan?

2.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis uraikan di atas, bahwa tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kesesuaian Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan Peraturan Perpajakan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan Peraturan Perpajakan.
3. Untuk mengetahui kesesuaian Penyeteroran PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan Peraturan Perpajakan.
4. Untuk mengetahui kesesuaian Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan Peraturan Perpajakan.

2.4 Manfaat Magang

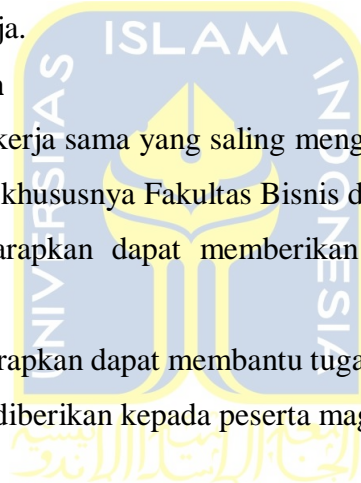
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

2.4.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa mampu menerapkan teori dan ilmu pengetahuan mengenai keuangan, khususnya di bidang akuntansi, dalam dunia kerja serta menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal.
- b. Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja secara langsung di perusahaan sebagai bekal mahasiswa terjun di dunia kerja setelah lulus pendidikan formal.
- c. Mahasiswa mampu meningkatkan *softskill* dan *hardskill* yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

2.4.2 Bagi Perusahaan

- a. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Universitas Islam Indonesia khususnya Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
- b. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada perusahaan.
- c. Mahasiswa diharapkan dapat membantu tugas dari karyawan terkait dengan pekerjaan yang diberikan kepada peserta magang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011) Pajak didefinisikan selaku iuran pada negara yang wajib dibayar oleh wajib pajak, dipotong ataupun dipungut berdasarkan undang-undang, serta dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Mardiasmo (2011) menuturkan pajak merupakan iuran pada kas negara menurut UU dengan tidak menerima jasa timbal langsung bisa diarahkan serta dipakai buat melunasi pengeluaran umum. Pajak merupakan iuran warga pada negara dipakai guna keperluan masyarakat.

3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merujuk pada UU No. 17 Tahun 2000 merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan yang didapat sepanjang tahun pajak. Tahun pajak menurut UU PPh Nomor. 17 Tahun 2000 ialah tahun takwim, tetapi Wajib Pajak bisa memakai tahun buku berlainan dengan tahun takwim tersebut meliputi jangka 12 bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Sebagai pajak langsung, menjadi tanggungan setiap wajib pajak artinya pajak penghasilan tidak bisa dialihkan pada pihak ketiga ataupun dimasukkan dalam kalkulasi harga jual ataupun biaya produksi.

3.3 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Menurut UU. No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 Ayat 2 Dikatakan final karena penghasilan tersebut dipisah dengan penghasilan lain yang terdapat pada pajak terutang dan tidak bisa dikreditkan pada SPT Tahunan. Akan tetapi, PPh final tersebut tetap dilaporkan pada SPT Tahunan di akhir tahun.

3.3.1 Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

Merujuk UU No. 42 Tahun 2009 merupakan jumlah pembayaran yang diterima diluar dari PPN dan digunakan sebagai dasar jumlah yang

akan dikalikan dengan tarif pajak. Didalam kontrak jasa konstruksi nilai DPP diperoleh dari hasil pengurangan potongan tertentu dan PPN.

3.3.2 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Tabel 1.

Tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi

No.	Jenis Kegiatan	Kualifikasi	Tarif
1.	Pelaksana Kontruksi	Kualifikasi Kecil	2%
2.		Kualifikasi Menengah dan Besar	3%
3.		Tidak memiliki kualifikasi	4%
4.	Perencana dan Pengawas Kontruksi	Memiliki kualifikasi	4%
5.		Tidak memiliki kualifikasi	6%

3.3.3 Tata cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

$$\text{Nilai Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

3.3.4 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Merujuk pada PMK No. 153/PMK.03/2009. PPh final pasal 4 ayat (2) pemotongan dilakukan oleh pengguna jasa jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak pada saat pembayaran. Bila pengguna jasa memiliki status non pemotong pajak maka penyedia jasa wajib menyeter sendiri pajak penghasilannya.

3.3.5 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Merujuk pada PMK No. 153/PMK.03/2009. Jika pengguna jasa memiliki status sebagai pemotong pajak maka dalam menyetorkan pajak akan dilaksanakan oleh pengguna jasa. Sebaliknya, jika pengguna jasa tidak berstatus sebagai pemotong pajak maka penyetoran dilakukan sendiri oleh pemberi jasa. Dalam penyetoran pajak maksimal dilaksanakan tanggal 10 pada bulan setelahnya dan akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan jika terjadi keterlambatan penyetoran.

3.3.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Merujuk pada PMK No. 153/PMK.03/2009, batas waktu dalam melaporkan yaitu maksimal tanggal 20 bulan depan setelah dilakukan pemotongan pajak dengan melampirkan dokumen bukti setoran atau bukti potong. Formulir yang digunakan dalam melaporkan pajak yaitu SPT Masa PPh Final.

3.4 Pengertian Jasa Kontruksi

Pengertian jasa konstruksi menurut undang-undang (UUJK) adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (building construction), instalasi mekanikal & elektrik, dan juga pembangunan prasarana sipil (civil engineer). Jasa ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas umum hingga kantor, oleh karena itu kegiatan ini diatur landasan hukumnya dalam UU No.18 Tahun 1999 yang mengatur Tentang Jasa Konstruksi.

3.5 Kajian Terdahulu

Tabel 1. Kajian Penerapan Pajak Sebelumnya

No.	Penulis	Objek	Temuan
1.	Nur R.W (2018)	PT. Deltha Kahuripan	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan penerapan perpajakan yang dilakukan masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu pengenaan tarif yang seharusnya 3% akan tetapi pada penerapannya sebesar 2%
2.	Hillary S.P.R., Jullie J.S, Anneke W.(2018)	PT. Realita Timur Perkasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, dan penyeteroran susah sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku akan tetapi dalam melaporkan pajak masih tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan pelaporan pajak.
3.	Dhian N.R., David P.S, Heinc W. (2016)	PT. Dua Mutiara Sejati	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan penerapan perpajakan yang meliputi perhitungan dan pemotongan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4.	Daniela Anauskah dan Nurlela Hafidzah (2018)	WIKA-HUTAMA JO	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan penerapan perpajakan yang meliputi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan
5.	Wahyuningsih, N (2020)	NINDYA PASSOKORANG (KSO)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa perhitungan pengenaan tarif susah sesuai, pemotongan dan penyetoran dilakukan oleh pengguna jasa karena berstatus sebagai pemotong pajak
6.	Nurul Masrifa (2020)	PT SEMEN BOSOWA MAROS	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan penerapan pajak yang meliputi pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis riset yang digunakan merupakan penelitian kualitatif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT Utama Karya (Persero) yang beralamat di Jalan Bintari Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Proses penelitian ini dimulai pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2021

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data kualitatif pada penelitian ini ialah data yang berupa penjelasan tentang penerapan pajak yang dilakukan bagian keuangan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti bukti-bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Sumber Data

Terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik yang dipakai oleh penulis untuk memperoleh data primer dan sekunder antara lain yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT Utama Karya (Persero)

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini, yakni teknik dokumentasi serta wawancara.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang agar memperoleh data dan informasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Setoran Pajak, Sertifikat Badan Usaha, SP2D, Surat Perintah Membayar, Flow Proses PPN Keluaran dan PPh Final Pasal 4 ayat 2.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang mengaitkan 2 orang ataupun lebih, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan serta sumber memberikan tanggapannya. Metode yang dipakai penulis yaitu penulis bebas bertanya namun mengikuti prinsip wawancara yang ada. Dalam penelitian ini objek wawancara adalah Site Administration Manager atau Manajer Keuangan dari Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan yakni metode Deskriptif Kuantitatif dengan proses analisis Deskriptif Komparatif. Ada pula fokus analisa riset ini :

1. Melaksanakan analisa perihal kalkulasi serta pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas pelayanan kontruksi yang dilakukan PT Hutama Karya (Persero) melalui metode menganalisa data SPM (Surat Perintah Membayar), dengan tujuan mengenali apakah kalkulasi telah selaras pada PP Nomor. 40 tahun 2009, serta pemotongann pajak yang bersumber pada PMK No 153/ PMK. 03/2009.
2. Melaksanakan analisa perihal metode penyetoran Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 oleh PT. Hutama Karya (Persero), apakah penyetorannya telah merujuk pada PMK No 153/PMK. 03/2009.
3. Melaksanakan analisa perihal cara pelaporan Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 oleh PT. Hutama Karya (Persero), apakah pelaporannya telah sesuai dengan PMK Nomor. 153/PMK.03/2009 dalam perihal keseluruhan arsip serta akurasi waktu ketika pajak penghasilan final artikel 4 ayat 2 jasa konstruksi dilaporkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1 Profil Perusahaan (PT Utama Karya)

PT Utama Karya dimulai dengan sederhana sebagai perusahaan konstruksi swasta. Paduan antara kelincahan beradaptasi dengan iklim bisnis yang terus berubah serta kegigihan, inovasi, dan layanan yang beragam menempatkan Perusahaan sebagai salah satu pengembang infrastruktur terdepan di Indonesia.

PT Utama Karya merupakan BUMN bidang Jasa Kontruksi yang kepemilikannya dikuasai pemerintah seluruhnya. Terdapat beberapa Divisi yang dimiliki PT. Utama Karya antara lain:

1. Direktorat Keuangan membawahi:
 - Divisi Corporate Planning
 - Divisi Akuntansi dan Keuangan
 - Divisi Manajemen Resiko
2. Direktorat Operasi I membawahi:
 - Divisi Sipil Umum
 - Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi
 - Divisi Sistem, TI dan Teknologi Riset
 - Proyek khusus/ KPBU
3. Direktorat Operasi II membawahi:
 - Divisi Gedung
 - Divisi EPC
 - Divisi QHSSE
4. Direktorat Operasi III membawahi:
 - Divisi Perencanaan Jalan Tol
 - Divisi Pembangunan Jalan Tol
 - Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
5. Direktorat Human Capital dan Legal Membawahi:
 - Divisi Human Capital
 - Divisi Legal

Visi :

Indonesia's Most Valuable Infrastructure Developer #IMVID
Pengembangan Infrastruktur Terkemuka Indonesia.

Misi :

1. Menyukkseskan mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans-Sumatra.
2. Mengembangkan multi-bisnis berbasis infrastruktur melalui usaha investasi jasa konstruksi dan manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah premium pada korporasi dan dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia.
3. Membangum kapasitas dan kapabilitas korporasi yang berkesinambungan melalui penempatan human capital dan financial capital.

4.2 Aktivitas Magang

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Magang

Selama pelaksanaan magang sejak awal magang yaitu tanggal 22 September 2021 hingga selesai magang tanggal 20 November 2021 adalah penulis melakukan mempelajari sistem atau prosedur keuangan yang digunakan di Hutama Karya khususnya di proyek pembangunan Gedung PKN STAN. Selain itu, penulis juga mempelajari kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pembangunan, yaitu kontrak dengan supplier atau vendor dan kontrak dengan owner atau pemberi pekerjaan.

Selama mempelajari kontrak, penulis membantu staff akuntansi dalam memverifikasi kelengkapan tagihan agar tagihan tersebut dapat diakui oleh proyek baik sebagai hutang maupun dibayarkan secara langsung. Kelengkapan tersebut antara lain tagihan asli yang ditujukan kebagian keuangan (pihak pertama), kwitansi bermaterai, salinana dokumen kontrak, dan lampiran administrasi pajak. Kemudian penulis mempelajari penggunaan SAP FICO yang digunakan oleh PT Hutama Karya (Persero). Dalam mempelajari penggunaan SAP, penulis menginput pengeluaran dan pemasukan kas yang terjadi di proyek setiap bulannya.

Selain mempelajari sistem keuangan di proyek, penulis juga membantu bagian bagian lain dalam melaksanakan tugasnya. Seperti bagian umum dalam

membuat GAP Analysis karyawan yang dibutuhkan untuk menganalisis perbedaan skill antara kebutuhan dan kondisi nyata karyawan. Kemudian penulis juga mempelajari terkait dokumen dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengeluaran kas kecil yaitu dokumen SPB/Surat Pengadaan Barang (Form P-1), Kas Bon (form K-4), Bukti Pembayaran (Form K-3), dan Daftar Pengeluaran (Form K-5).

Penulis juga membantu bagian QHSE atau Quality, Health, Safety, and Environment system dalam membuat rekapan hasil Medical Check Up Karyawan yang digunakan untuk mengevaluasi tindak lanjut dan dasar penanganan oleh dokter yang datang ke proyek. Kemudian penulis membantu QHSE dalam menyesuaikan anggaran biaya SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Kerja) dengan format baru sesuai dengan PUPR No. 10 Tahun 2021.

Pada tanggal 16 November 2021 dilaksanakan audit eksternal di proyek pembangunan Gedung PKN STAN yang dilakukan oleh SGS Indonesia. Dalam proses persiapan audit, penulis membantu QHSE merevisi dan mengunggah dokumen yang digunakan untuk audit ke tautan yang sudah disediakan oleh pihak auditor.

A. Ketercapaian Pelaksanaan Magang

Minggu	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1	22 September 2021 – 25 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari profil PT Utama Karya (Persero) dan Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN - Mempelajari sistem akuntansi yang digunakan di proyek - Membuat <i>GAP Analysis</i> karyawan
2	27 September 2021 – 01 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari kontrak dan pengenaan pajak di proyek - Membuat evaluasi <i>Medical Check Up</i> Karyawan - Mempelajari mengenai proses dan perhitungan tender

3	04 Oktober 2021 – 08 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari penggunaan SAP FICO - Mempelajari kontrak dengan supplier (sub kontraktor, mandor) - Membantu revisi dokumen audit internal
4	11 Oktober 2021 – 15 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput pembukuan kas bulan September ke SAP - Membuat penyesuaian anggaran biaya SMKK dengan format baru sesuai dengan PUPR No. 10 Tahun 2021 - Membantu mengoreksi RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi)
5	18 Oktober 2021 – 22 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi terkait data laporan magang ke <i>site administration manager</i> dan <i>general administration</i> - Melakukan labelling pintu dari lantai 5 sampai 7 proyek Gedung PKN STAN
6	25 Oktober 2021 – 29 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat skenario simulasi keadaan darurat kecelakaan kerja dan kebakaran - Melakukan <i>Tool Box Meeting (TBM)</i> dan <i>safety campaign</i> - Membantu verifikasi dokumen tagihan pembayaran ke subcontractor
7	01 November 2021 – 05 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat skenario simulasi keadaan darurat tumpahan limbah B3 dan Covid - Membantu verifikasi dokumen tagihan pembayaran mandor
8	08 November 2021 – 12 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Merekap dokumen dokumen terkait audit eksternal SGS - Memperbarui <i>GAP Analysis</i> perbulan mulai dari bulan Oktober 2020 hingga Oktober 2021

		- Mengunggah dokumen dokumen yang digunakan untuk audit eksternal SGS ke tautan yang sudah disediakan oleh auditor eksternal
9	15 November 2021 – 19 November 2021	- Melengkapi dokumen dokumen audit - Membantu melakukan audit internal pada Proyek Pengembangan Pipa CB-III (Lomanis-Tasikmalaya)
10	22 November 2021 – 26 November 2021	- Konsultasi terkait laporan tengah magang dengan mentor (SAM) - Membantu checklist arsitektur
11	29 November 2021 – 03 Desember 2021	- Merekap bukti pembayaran di form K-5 bulan November - Konsultasi terkait data laporan akhir magang

Selama magang, penulis mendapatkan data data mengenai sistem keuangan, prosedur pengelolaan pajak, dan penggunaan SAP FICO yang digunakan di proyek pembangunan Gedung PKN STAN. Data data tersebut akan digunakan oleh penulis untuk menyusun laporan akhir program magang sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan bagian *site administration manager* (SAM) dan *general administration* (GA). Selain dari wawancara, dilakukan pula analisis dokumen dokumen terkait dengan topik penelitian.

Selain data terkait bagian keuangan, penulis juga mendapatkan data dari bagian non keuangan yang dapat digunakan oleh penulis sabagai tambahan pengetahuan. Misalnya data terkait bagian *quality, health, safety, and environment system* (QHSE) yaitu anggaran biaya SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Kerja) dengan format baru sesuai dengan PUPR No. 10 Tahun 2021.

Berikut ini output yang didapatkan oleh penulis selama proses magang di Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT Utama Karya (Persero) :

1. Surat Permintaan Barang (SPB) atau Form P-1

2. Kas bon atau Form K-4
3. Bukti Pembayaran atau Form K-3
4. Daftar Pengeluaran atau Form K-5
5. Anggaran biaya SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Kerja) dengan format baru sesuai dengan PUPR No. 10 Tahun 2021.
6. GAP Analysis Karyawan perbulan
7. Adendum kontrak mess tahun 2021-2022
8. Kontrak proyek PKN STAN
9. Kontrak Subcontractor
10. Kontrak Mandor
11. Tagihan supplier yang telah di verifikasi
12. Surat Perintah Membayar (SPM) PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DPPH pasal 4 ayat 2 dan PPN pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN
14. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT Utama Karya terkait Rincian dan Kualifikasi Badan Usaha
15. Surat Setoran Pajak (SSP) pasal 4 ayat 2 dan PPN pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN
16. Hasil post with Clearing Correct G/L account item SAP FICO bulan September - November 2021

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

*Tabel 2. Perhitungan DPP atas Proyek Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Gedung
PKN STAN Bintaro*

Nilai Kontrak	Rp 172.732.539.106
PPN. 10%	Rp 15.702.958.101
Nilai Borongan	Rp 157.029.581.006

Uraian	Akumulasi Prestasi Pekerjaan	Prestasi Pekerjaan	Nilai Prestasi Pekerjaan	Nilai Uang Muka	Retensi (5%)	Berita Acara Pembayaran
Uang Muka 15%	-	-		Rp. 23.554.437.151	-	Rp. 23.554.437.151
Termin 1	21,0978%	21,0978%	Rp. 33.129.786.941	Rp. 4.969.468.041	Rp. 1.656.489.347	Rp. 26.503.829.553
Termin 2	36,0978%	15,0000%	Rp. 23.554.437.151	Rp. 3.533.165.573	Rp. 1.177.721.858	Rp. 18.843.549.721
Termin 3	51,0978%	15,0000%	Rp. 23.554.437.151	Rp. 3.533.165.573	Rp. 1.177.721.858	Rp. 18.843.549.721
JUMLAH	-	51,0978%	Rp. 80.238.661.243	Rp. 12.035.799.186	Rp. 4.011.933.062	Rp. 87.745.366.145

Keterangan:

1. Nilai Prestasi Pekerjaan merupakan hasil perkalian dari prestasi pekerjaan atau progress pekerjaan dengan nilai kontrak.
2. Nilai Uang Muka merupakan hasil perkalian dari nilai prestasi pekerjaan dengan nilai uang muka yang didasarkan pada kesepakatan di dalam kontrak dalam hal ini sebesar 15% dari nilai kontrak.
3. Retensi merupakan nilai yang ditahan sebagai jaminan pekerjaan sebesar 5% dikalikan dengan nilai prestasi pekerjaan.

4. Berita Acara Pembayaran merupakan Nilai Prestasi Pekerjaan setelah dikurangi Nilai Uang Muka dan Retensi. Hasil dari nilai Berita Acara Pembayaran ini disebut dengan Dasar Pengenaan Pajak.

5.1 Analisis perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi.

Untuk menentukan jumlah pajak yang dikenakan maka diperlukan DPP sebagai objek yang akan dikalikan dengan tarif pengenaan pajak. Dalam hal ini untuk menghitung DPP yaitu tagihan bruto PT. Utama Karya (Persero) dikurangi dengan potongan uang muka dan retensi. Yang dimaksud retensi jumlah termin yang ditahan atau belum dibayar sampai pemenuhan kondisi yang telah disepakati di dalam kontrak yaitu sebesar 5%. Berdasarkan Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Gedung PKN STAN, nilai kontrak merupakan harga borongan ditambah dengan PPN. Oleh karena itu, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat di formulasikan dengan rumus $\{(DPP = (Prestasi Pekerjaan \times Nilai Borongan) - (Retensi 5\% \times (Prestasi Pekerjaan \times Nilai Borongan)) - (Persentase Uang Muka \times Nilai Borongan))\}$ selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak yang dikenakan sehingga jumlah PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang dikenakan dapat ditentukan. Berdasarkan tabel di atas,

- DPP untuk pembayaran angsuran Termin 1 pada bulan Desember 2020 diperoleh dari $(Prestasi Pekerjaan \text{ sebesar } 21,0978\% \times Nilai Borongan \text{ sebesar } 157.029.581.006) - (Retensi 5\% \times (Prestasi Pekerjaan 21,0978\% \times Nilai Borongan 157.029.581.006)) - (Persentase Uang Muka 15\% \times (Progress Pekerjaan \text{ sebesar } 21,0978\% \times Nilai Borongan \text{ sebesar } 157.029.581.006))$ sehingga menghasilkan nilai **DPP** sebesar **Rp. 26.503.829.553**.
- DPP untuk pembayaran angsuran Termin 2 pada bulan April 2021 diperoleh dari $(Progress Pekerjaan \text{ sebesar } 15\% \times Nilai Borongan \text{ sebesar } 157.029.581.006) - (Retensi 5\% \times (Progress Pekerjaan 15\% \times Nilai Borongan 157.029.581.006)) - (Persentase Uang Muka 15\% \times (Progress$

Pekerjaan sebesar 15% x Nilai Borongan sebesar 157.029.581.006))

sehingga menghasilkan nilai **DPP** sebesar **Rp. 18.843.549.721**

- DPP untuk pembayaran angsuran Termin 3 pada bulan Juli 2021 diperoleh dari *(Progress Pekerjaan sebesar 15% x Nilai Borongan sebesar 157.029.581.006) – (Retensi 5% x (Progress Pekerjaan 15% x Nilai Borongan 157.029.581.006)) – (Persentase Uang Muka 15% x (Progress Pekerjaan sebesar 15% x Nilai Borongan sebesar 157.029.581.006))* sehingga menghasilkan nilai **DPP** sebesar **Rp. 18.843.549.721**
- Akan tetapi khusus untuk perhitungan **DPP** uang muka diperoleh dari *(Persentase Uang Muka 15% x Nilai Borongan Rp 157.029.581.006)* sehingga menghasilkan **DPP** Uang Muka sebesar **Rp. 23.554.437.151**

Tabel 3. Daftar Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Proyek Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Gedung PKN STAN Bintaro

Uraian	DPP	PPN (10%)	Total (Include PPN)	PPH (3%)	Sudah Dibayar
Uang Muka 15%	Rp. 23.554.437.151	Rp. 2.355.443.715	Rp. 25.909.880.866	Rp. 706.633.115	Rp. 22.847.804.036
Termin 1	Rp. 26.503.829.553	Rp. 2.650.382.955	Rp. 29.154.212.508	Rp. 795.114.887	Rp. 25.708.714.667
Termin 2	Rp. 18.843.549.721	Rp. 1.884.354.972	Rp. 20.727.904.693	Rp. 565.306.492	Rp. 18.278.243.229
Termin 3	Rp. 18.843.549.721	Rp. 1.884.354.972	Rp. 20.727.904.693	Rp. 565.306.492	Rp. 18.278.243.229
JUMLAH	Rp. 87.745.366.145	Rp. 8.774.536.615	Rp. 96.519.902.760	Rp.2.632.360.984	Rp. 85.113.005.162

5.2 Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

Dalam menganalisis perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 menggunakan data Surat Perintah Membayar (SPM) menjelaskan perihal nilai kontrak, penghasilan yang diterima, nilai PPh Final Pasal 4 ayat 2 dikenakan serta pemotongan PPN keluaran. Selain itu, di dalam SPM menjelaskan jenis pekerjaan dilakukan oleh industri serta tanggal berapa penghasilan itu diterima. Berdasarkan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) PT. Utama Karya (Persero) dengan nilai kekayaan bersih Rp 22.958.609.959,00 masuk dalam kualifikasi besar yang berlaku sampai 12 Juli 2023 dan dikenakan tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebanyak 3%. Untuk perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

- Pembayaran angsuran Termin 1 diperoleh dari (*Tarif Pajak 3% x DPP Termin 1 Rp. 26.503.829.553*) sehingga menghasilkan PPh sebesar *Rp. 795.114.887*
- Pembayaran angsuran Termin 2 diperoleh dari (*Tarif Pajak 3% x DPP Termin 1 Rp. 18.843.549.721*) sehingga menghasilkan PPh sebesar *Rp. 565.306.492*
- Pembayaran angsuran Termin 3 diperoleh dari (*Tarif Pajak 3% x DPP Termin 1 Rp. 18.843.549.721*) sehingga menghasilkan PPh sebesar *Rp. 565.306.492*
- Sedangkan PPh uang muka diperoleh dari (*Tarif Pajak 3% x DPP Uang Muka 23.554.437.151*) menghasilkan PPh Uang Muka sebesar *Rp. 706.633.115*

Pemotongan dilaksanakan ketika pembayaran jika pengguna jasa berstatus pemotong pajak. Tetapi, bila pengguna jasa non pemotong pajak maka pemotongan pajak akan dilakukan sendiri oleh wajib pajak yaitu pihak PT. Utama Karya (Persero) sebagai penyedia jasa. Bersumber pada PP No 40 Tahun 2009 serta PMK no.153/PMK. 03/ 2009, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi oleh PT. Utama Karya (Persero) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilaksanakan oleh pengguna jasa yang memiliki status pemotong pajak.

Tabel 4.

Daftar Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Uraian	Tanggal Penyetoran	Tanggal Jatuh Tempo	DPP	PPN (10%)	PPh (3%)
Uang Muka 15%	20-Oct-2020	10-Nov-2020	Rp. 23.554.437.151	Rp. 2.355.443.715	Rp. 706.633.115
Termin 1	18-Dec-2020	10-Jan-2021	Rp. 26.503.829.553	Rp. 2.650.382.955	Rp. 795.114.887
Termin 2	20-Apr-2021	10-Mei-2021	Rp. 18.843.549.721	Rp. 1.884.354.972	Rp. 565.306.492
Termin 3	26-Jul-2021	10-Agust-2021	Rp. 8.843.549.721	Rp. 1.884.354.972	Rp. 565.306.492

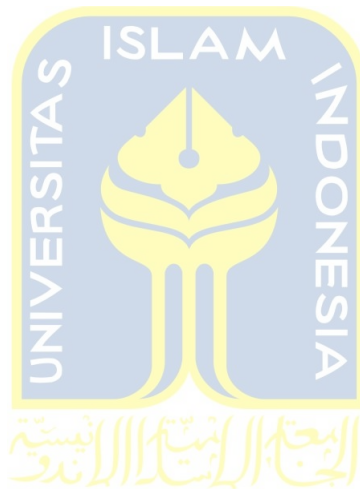
5.3 Analisis Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Setelah dilakukan Perhitungan dan Pemotongan, tahap selanjutnya adalah dengan melakukan pembayaran. Dalam perihal ini PT. Utama Karya (Persero) tidak lagi menyetorkan PPh Final sendiri, melainkan oleh pengguna jasa karena berstatus sebagai pemotong pajak. Sebaliknya, bila pengguna jasa tidak berstatus selaku pemotong pajak, PT. Utama Karya (Persero). Selaku WP yang menerima penghasilan wajib menyetorkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini, penyetoran pajak yang dilakukan oleh pengguna jasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan selalu tepat waktu sebelum batas jatuh tempo pembayaran sehingga tidak dikenai sanksi berupa denda sebesar 2%.

5.4 Analisis Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Menurut PP Nomor. 40 Tahun 2009 serta PMK Nomor. 243/PMK.03 Tahun 2014 yang menerangkan jika SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 serta dokumen yang wajib dilampirkan harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan

selanjutnya. Jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan, akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 untuk PPN dan Rp. 100.000. Mengenai pemenuhan kewajiban melaporkan PPh Final Pasal 4 ayat 2, PT. Utama Karya (Persero) tidak mengalami kendala dalam pelaporan pajak karena dari pihak pengguna jasa dalam membagikan dokumen-dokumen yang hendak dipakai untuk dilampirkan dalam SPT Masa selalu tepat waktu sehingga ketika melaporkan pajak tidak terjadi kendala yang menyebabkan keterlambatan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai penerapan pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT. Hutama Karya (Persero). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak sampai dengan Termin 3 pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT. Hutama Karya (Persero) sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan Kontrak Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gedung PKN STAN yang menjelaskan DPP merupakan nilai harga jual. Dalam hal ini nilai kontrak sudah termasuk PPn sehingga perlu dikurangi dengan PPn, Retensi dan Potongan Uang muka.
2. Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi Pajak sampai dengan Termin 3 pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT. Hutama Karya (Persero) sudah sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009 serta PMK No. 153/PMK.03/2009, yaitu tarif pengenaan pajak sebesar 3% dengan golongan kualifikasi usaha besar berdasarkan Sertifikat Ijin Usaha Kontruksi (SIUJK) yang dimiliki PT. Hutama Karya (Persero).
3. Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi Pajak sampai dengan Termin 3 pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT. Hutama Karya (Persero) sudah sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009 karena dipotong oleh pengguna jasa yaitu PKN STAN pada saat melakukan pembayaran karena pengguna jasa dalam hal ini berstatus sebagai pemotong pajak.
4. Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi Pajak sampai dengan Termin 3 pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT. Hutama Karya (Persero) sudah sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, karena PT. Hutama Karya (Persero) tidak lagi menyetorkan pajak dan sudah sesuai dengan ketentuan batas waktu yang

telah ditentukan. Selain itu, penyetoran juga sudah dilakukan melalui sistem *e-billing* yang berbasis online sehingga lebih mudah, praktis dan akurat.

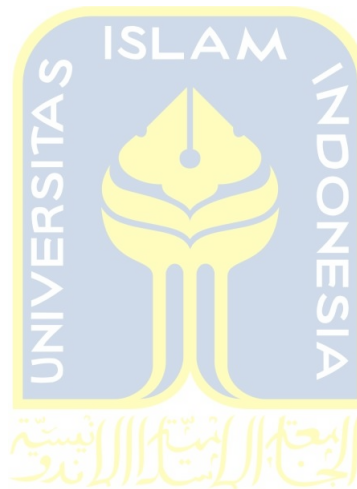
5. Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi Pajak sampai dengan Termin 3 pada Proyek Pembangunan Gedung Politeknik STAN oleh PT. Hutama Karya (Persero) juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik No. 153/PMK.03/2009, karena dalam melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada SPT Masa dilakukan dikirim dengan tepat waktu oleh pihak pengguna jasa yaitu PKN STAN kepada penyedia jasa yaitu PT. Hutama Karya (Persero). Sehingga, dalam pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 PT. Hutama Karya (Persero) tidak mengalami keterlambatan yang menyebabkan terkena sanksi.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan antara lain penelitian oleh Wahyuningsih N. (2020) dengan judul yang sama terkait penentuan tarif pajak di mana tarif pajak yang ditentukan sebesar 2% yang harusnya dikenakan 3% dengan kualifikasi perusahaan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009. Selain itu terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu oleh Hillary S.P Ratuela (2018) yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik No. 153/PMK.03/2009 karena melewati batas waktu jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya.

6.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian ini, penulis menyarankan beberapa poin sebagai berikut: (1) supaya senantiasa diperhatikan terkait ketentuan perpajakan dalam perihal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi dan mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, (2) Memperhatikan terkait masa berlaku dan kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tarif pajak karena akan berpengaruh terhadap nilai pajak yang dikenakan, (3) PT. Hutama Karya (Persero) selaku penyedia jasa dan PKN STAN selaku pengguna jasa untuk selalu update terkait

ketentuan maupun peraturan perpajakan khususnya PPh Final Pasal 4 ayat 2 agar dan tidak terkena sanksi perpajakan yang telah ditetapkan (4) Untuk penelitian selanjutnya saran penulis yaitu lebih teliti dalam menganalisis perhitungan Berita Acara Pembayaran atau DPP karena nilainya harus sesuai dengan Kontrak Perjanjian antar kedua belah pihak di mana terdapat pengurangan dengan nilai uang muka dan retensi



Daftar Pustaka

Hafidzah, D. A. (2018). Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi e-SPT Masa 2017. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.

Wahyuningsih, N. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada NINDYA - PASSOKORANG (KSO).

Hillary S.P Ratuela1, J. J. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.

Setiadi. (2019). PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* .

Masrifa, N. (2020). Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pada PT Semen Bosowa Maros. *Economics bosowa journal*.

Wahidah, N. R. (2018). Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi atas Beban Pajak (Studi Kasus Pada DELTA GROUP). *Jurnal Sekretari Vol. 5 No. 2* .

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5014. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan nomor: 187/PMK.03/2008 Tentang Tata cara pemotongan, penyetoran, peraturan dan penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi. Biro Umum Departemen Keuangan Republik Indonesia 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.153/PMK.03/2009 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan (SPT).

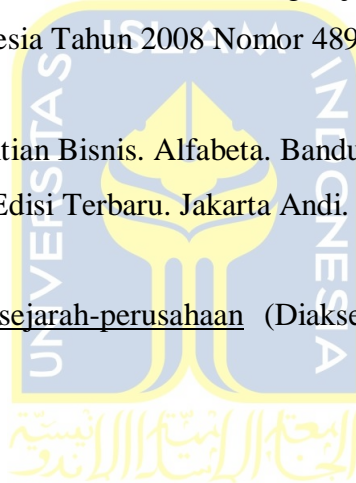
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 *Pembagian Subkalsifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893. Jakarta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Jakarta Andi. Yogyakarta.

<https://www.hutamakarya.com/sejarah-perusahaan> (Diakses pada tanggal 18 September 2021)



Lampiran

Lampiran 1: Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT. Hutama Karya (Persero)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **HUTAMA KARYA (PERSERO), PT**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Besar**
Anggota Asosiasi : **AKI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	B2	BG001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel	2013	279,278
2	B2	BG002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	2012	806,188
3	B2	BG003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	2019	500,640
4	B2	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	2017	613,370
5	B2	BG005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik	2014	1,479,544
6	B2	BG006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	2018	352,733
7	B2	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	2018	453,927
8	B2	BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	2019	789,322
9	B2	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	2011	1,398,358



الجمهورية العربية السورية


Lampiran 2: Surat Perintah Membayar SPM) Termin 1

KEMENTERIAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR														
Nomor 00505A	Tanggal 17-Des-2020	Halaman 1 dari 1												
Kuasas Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 25.708.714.666,00														
**** DUA PULUH LIMA MILYAR TUJUH RATUS DELAPAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT BELAS RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH ****														
Tahun Anggaran: 2020 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA-015.11.1.477198 /2020 Tanggal : 12-Nov-2019 UU NO 20 TAHUN 2019 TENTANG APBN TA 2020	Nomor CAN : A/019.20007027/1/0 Tanggal Kontrak/SPK : 01-10-2020 Nomor Kontrak/SPK : PRJ-003/PPK/054/2020	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001												
PENGELUARAN		JUMLAH UANG												
477198.019.533111.0151104.1738951.A000000001.00000.1.2954.2.000000.000000		29.154.212.508,00												
Jumlah Pengeluaran		29.154.212.508,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
675652.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		795.114.887,00												
675652.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		2.650.382.955,00												
Jumlah Potongan		3.445.497.842,00												
TOTAL PEMBAYARAN		25.708.714.666,00												
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor Supplier : 2163</td> <td>Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA, Bank BNI Cabang Mega Kuningan</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)</td> <td>Rekening : 0137604112</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 010016111093000</td> <td>Nama Pemilik : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 :</td> <td>Uraian : Prbyrn term 1 Knstrkal Pembangunan Ged Pendidikan brdsrkan BAPP no BA-025/PPK/054/2020 tgl 15 Des 2020, BAP no BA-025/PPK/054/2020 tgl 15 Des 2020, sisa pekerjaan Rp10.561.014.425, Gmsl Bank PT BNI (Persero) Tbk no 20/OJR/040/6024/Selasa tgl 15 Des 2020</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT : JL LETJEN HARYONO MT KAVLING 8</td> <td></td> </tr> </table>			Nomor Supplier : 2163	Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA, Bank BNI Cabang Mega Kuningan	Nama Supplier : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	Rekening : 0137604112	NPWP1 : 010016111093000	Nama Pemilik : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	NPWP2 :	Uraian : Prbyrn term 1 Knstrkal Pembangunan Ged Pendidikan brdsrkan BAPP no BA-025/PPK/054/2020 tgl 15 Des 2020, BAP no BA-025/PPK/054/2020 tgl 15 Des 2020, sisa pekerjaan Rp10.561.014.425, Gmsl Bank PT BNI (Persero) Tbk no 20/OJR/040/6024/Selasa tgl 15 Des 2020	NOP :		ALAMAT : JL LETJEN HARYONO MT KAVLING 8	
Nomor Supplier : 2163	Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA, Bank BNI Cabang Mega Kuningan													
Nama Supplier : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	Rekening : 0137604112													
NPWP1 : 010016111093000	Nama Pemilik : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)													
NPWP2 :	Uraian : Prbyrn term 1 Knstrkal Pembangunan Ged Pendidikan brdsrkan BAPP no BA-025/PPK/054/2020 tgl 15 Des 2020, BAP no BA-025/PPK/054/2020 tgl 15 Des 2020, sisa pekerjaan Rp10.561.014.425, Gmsl Bank PT BNI (Persero) Tbk no 20/OJR/040/6024/Selasa tgl 15 Des 2020													
NOP :														
ALAMAT : JL LETJEN HARYONO MT KAVLING 8														
<p>Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM</p> <p style="text-align: right;">TANGERANG SELATAN, 17 Desember 2020 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM</p> <div style="text-align: center;">  AMIK YUNYANTI NIP 197406291995112001 </div>														
<p>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM</p>														

Lampiran 3: Surat Perintah Membayar SPM) Termin 2

KEMENTERIAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR														
Nomor 00067A	Tanggal 20-Apr-2021	Halaman 1 dari 1												
Kuasas Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 18.278.243.229,00														
**** DELAPAN BELAS MILYAR DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH ****														
Tahun Anggaran: 2021 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA-015.11.1.477198 /2021 Tanggal : 23-Nov-2020 UU NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG APBN TAHUN 2021	Nomor CAN : A/019.20007027/2/0 Tanggal Kontrak/SPK : 01-10-2020 Nomor Kontrak/SPK : PRJ-003/PPK/054/2020	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 20-Apr-2021 Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001												
PENGELUARAN		JUMLAH UANG												
477198.019.533111.01511WA.4680EAE.A000000001.00000.1.2954.2.000000.000000		20.727.904.693,00												
Jumlah Pengeluaran		20.727.904.693,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
675652.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		565.306.492,00												
675652.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		1.884.354.972,00												
Jumlah Potongan		2.449.661.464,00												
TOTAL PEMBAYARAN		18.278.243.229,00												
<p>Kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nomor Supplier : 2163</td> <td>Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA, Bank BNI Cabang Mega Kuningan</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)</td> <td>Rekening : 0137604112</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 010016111093000</td> <td>Nama Pemilik : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 : :</td> <td>Uraian : Pembayaran Termin 2 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-006/PPK/054/2021 tgl 6 April 2021</td> </tr> <tr> <td>NOP : :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT : JL LETJEN HARYONO MT KAVLING 8</td> <td></td> </tr> </table>			Nomor Supplier : 2163	Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA, Bank BNI Cabang Mega Kuningan	Nama Supplier : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	Rekening : 0137604112	NPWP1 : 010016111093000	Nama Pemilik : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	NPWP2 : :	Uraian : Pembayaran Termin 2 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-006/PPK/054/2021 tgl 6 April 2021	NOP : :		ALAMAT : JL LETJEN HARYONO MT KAVLING 8	
Nomor Supplier : 2163	Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA, Bank BNI Cabang Mega Kuningan													
Nama Supplier : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	Rekening : 0137604112													
NPWP1 : 010016111093000	Nama Pemilik : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)													
NPWP2 : :	Uraian : Pembayaran Termin 2 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-006/PPK/054/2021 tgl 6 April 2021													
NOP : :														
ALAMAT : JL LETJEN HARYONO MT KAVLING 8														
<p>Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM</p>		<p>TANGERANG SELATAN, 20 April 2021</p> <p>Pejabat Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM</p>  <p>DMK YUNYANTI NIP-197406291995112001</p>												
<p>Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM</p>														

Lampiran 4: Surat Perintah Membayar SPM) Termin 3

KEMENTERIAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00171A	Tanggal 22-Jul-2021	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 18.278.243.229,00		
**** DELAPAN BELAS MILYAR DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2021 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-015.11.1.477198 /2021 Tanggal : 23-Nov-2020 UU NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG APBN TAHUN 2021	Nomor CAN : A/019.20007027/2/1 Tanggal Kontrak/SPK : 01-10-2020 Nomor Kontrak/SPK : PRJ-003/PPK/054/2020	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 23-Jul-2021 Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
477198.019.533111.01511WA.458/EAE.A000000001.00000.1.2954.2.000000.000000		20.727.904.693,00
Jumlah Pengeluaran		20.727.904.693,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
675652.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		565.306.492,00
675652.019.4111211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000		1.884.354.972,00
Jumlah Potongan		2.449.661.464,00
TOTAL PEMBAYARAN		18.278.243.229,00
Kepada: Nomor Supplier : 2163 Nama Supplier : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) NPWP1 : 010016111093000 NPWP2 : NOP : ALAMAT : JL LETJEN HARYONO MT KAVLING 8		
Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA, Bank BNI Cabang Mega Kuningan Rekening : 0137604112 Nama Pemilik : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) Uraian : Pembayaran Termin 3 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-012/PPK/054/2021 tgl 15 Juli 2021, Addndm Koreksi Data Kontrak tgl 15 Juli 2021		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM		TANGERANG SELATAN, 22 Juli 2021 a.n Kuasa Pengguna Anggaran dan Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		 ANTI NIP. 197406291995112001

Lampiran 5: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Muka



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D: 200191302012941 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	200191302012941	20-10-2020	20-10-2020	22,847,804,036.00	IDR	1	20-10-2020	22,847,804,036	NON GAJI KONTRAKTUAL	00350T477198/2020	19-10-2020	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Uang Muka Kerja 20% Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan PKN STAN TA 2020 Kontrak no PRL-003/PPK/054/2020 tgl 1 Okt 2020, BAP no BA-017/PPK/054/2020 tgl 14 Okt 2020, Jaminan UMI no 20/O.JR/028/7637/SENIN tgl 5 Okt	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



Lampiran 6: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200191302018277 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	200191302018277	18-12-2020	18-12-2020	25.708,714,666.00	IDR	1	18-12-2020	25.708,714,666	NON GAJI KONTRAKTUAL	00505T/477198/2020	17-12-2020	NON GAJI	Pmbym term 1 Knstrksi Pembangunan Ged Pendidikan brdsrkan BAPP no BA-025/PPK/054/2020 tgl 15 Des 2020, BAP no BA-025/PPK/054/2020 tgl 15 Des 2020, sisa pekerjaan Rp10.561.014.425, Gmsi Bank PT BNI (Persero) Tbk no 20/OUR/040/8024/Selasa t	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



Lampiran 7: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin 2



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA**

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 210191303003787 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	210191303003787	20-04-2021	21-04-2021	18,278,243,229.00	IDR	1	21-04-2021	18,278,243,229	NON GAJI KONTRAKTUAL	000677/477198/2021	20-04-2021	NON GAJI	Pembayaran Termin 2 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-006/PPK/054/2021 tgl 6 April 2021	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



Lampiran 8: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Termin 3

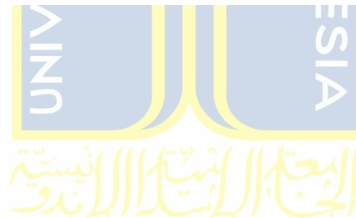


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 210191303008580 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	210191303008580	26-07-2021	26-07-2021	18,278,243,229.00	IDR	1	26-07-2021	18,278,243,229	NON GAJI KONTRAKTUAL	0017117477198/2021	22-07-2021	NON GAJI	Pembayaran Termin 3 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-012/PPK/054/2021 tgl 15 Juli 2021, Addndm Koreksi Data Kontrak tgl 15 Juli 2021	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



Lampiran 10: Surat Setoran Pajak (SSP) Termin 1



 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR <input type="checkbox"/> Untuk																									
NPWP : 01.001.611.1-093.000 NAMA WP : PT Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Hutama Karya ALAMAT WP : Jl. Letjen MT Haryono Kav no 8 RT 012/011, Jakarta Timur																													
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP : <input type="text"/>																													
Kode Akun Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kode Jenis Setoran : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Uraian Pembayaran : PPN Pembayaran Termin 1 Konstruksi Pembangunan Gedung PKN STAN																											
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Agt</th><th>Sept</th><th>Okt</th><th>Nop</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table>					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des												X	Tahun pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Ditisi tahun terutangnya pajak</small>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des																		
											X																		
<small>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</small>																													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPKB, SPKBT</small>																													
Jumlah Pembayaran : Rp 2.650.382.955 Terbilang : Dua milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah																													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan _____ Nama Jelas : _____			Wajib Pajak/Penyetor Tangerang Selatan Tanggal _____  Nama Jelas : _____																										
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																													

F.2.0.32.01

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR <input type="checkbox"/> Untuk																									
NPWP : 00.020.607.8-453.000 NAMA WP : Bendahara Pengeluaran STAN ALAMAT WP : Jl. Bintaro Utama Sektor V																													
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP : <input type="text"/>																													
Kode Akun Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kode Jenis Setoran : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Uraian Pembayaran : PPH Final Termin 1 Konstruksi Pembangunan Gedung																											
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Agt</th><th>Sept</th><th>Okt</th><th>Nop</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td> </tr> </table>					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des												X	Tahun pajak <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Ditisi tahun terutangnya pajak</small>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des																		
											X																		
<small>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</small>																													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPKB, SPKBT</small>																													
Jumlah Pembayaran : Rp 795.114.887 Terbilang : Tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah																													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan _____ Nama Jelas : _____			Wajib Pajak/Penyetor Tangerang Selatan Tanggal _____  Nama Jelas : _____																										
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																													



F.2.0.32.01

Lampiran 11: Surat Setoran Pajak (SSP) Termin 2

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1										
			Untuk Arsip Wajib Pajak										
NPWP : 0 1 0 0 1 6 1 1 1 0 9 3 0 0 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki													
Nama WP : HUTAMA KARYA (PERSERO)													
Alamat WP : JL LETJEN HARYONO MT KAVLING 8													
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak													
Alamat OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1		Kode Jenis Setoran 9 1 0											
Uraian Pembayaran : Pembayaran Termin 2 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-006/PPK/054/2021 tgl 6 April 2021													
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 2 1	
			X									Diisi Tahun terutangnya Pajak	
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan													
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB													
Jumlah Pembayaran : Rp. 1.884.354.972,00 Diisi dengan rupiah penuh													
Terbilang : Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal							Wajib Pajak / Penyetor Tanggal						
Nama :							 Nama :						
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

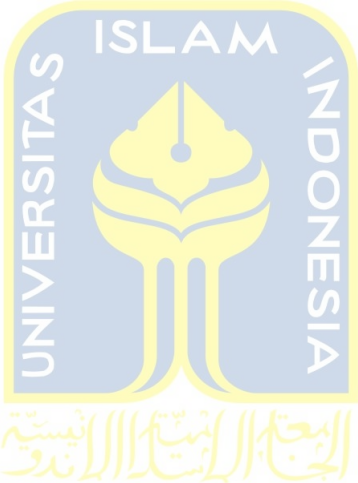
Lampiran 12: Surat Setoran Pajak (SSP) Termin 3

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak										
	NPWP : 00 020 607 8 453 000 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki Nama WP : POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN Alamat WP : JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V, BINTARO JAYA												
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak Alamat OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 8		Kode Jenis Setoran 1 0 9	Uraian Pembayaran : Pembayaran Termin 3 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-012/PPK/054/2021 tgl 15 Juli 2021, Addndm Koreksi Data Kontrak tgl 15 Juli 2021										
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 2 1	
						X							
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Diisi Tahun terutangnya Pajak	
Nomor Ketetapan : / / / Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB													
Jumlah Pembayaran : Rp. 565.306.492,00 Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal							Wajib Pajak / Penyetor Tanggal						
Nama :							Nama : 						
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

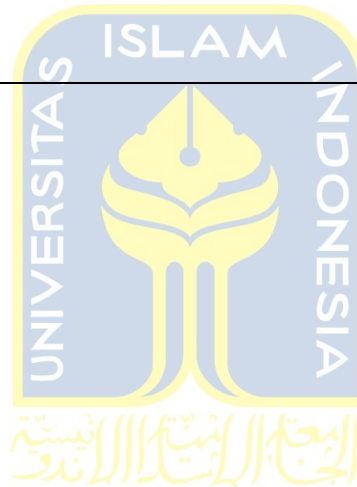
 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR	1											
		Untuk Arsip Wajib Pajak												
NPWP : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>														
Nama WP : HUTAMA KARYA (PESERO)														
Alamat WP : JL LETJEN HARYONO MT KAWLING 8														
NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>														
Alamat OP :														
Kode Akun Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>		Kode Jenis Setoran <input type="text" value="g"/> <input type="text" value="l"/> <input type="text" value="0"/>												
Uraian Pembayaran : Pembayaran Termin 3 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (tahun 2021) berdasarkan BAPP no BA-012/PPK/054/2021 tgl 15 Juli 2021, Addndm Koreksi Data Kontrak tgl 15 Juli 2021														
Masa Pajak											Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>		
						X								
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>		
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB</i>														
Jumlah Pembayaran : Rp. 1.884.354.972,00												<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>		
Terbilang : Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah														
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran							Wajib Pajak / Penyetor							
Tanggal							Tanggal							
Nama :														
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"														
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran														

Lampiran 13: Wawancara dengan Site Administration Manager (SAM)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dasar hukum apa yang digunakan dalam pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Hutama Karya?	Jadi, Dasar hukumnya pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 yang sebelumnya merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008
2.	Apa kualifikasi yang dimiliki oleh PT. Hutama Karya (Persero) berdasarkan Sertifikat Badan Usaha(SBU) yang dimiliki dan berapa tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Hutama Karya?	Jika didasarkan pada Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki, PT. Hutama Karya (Persero) masuk dalam kualifikasi besar dan jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tarif pajak yang dikenakan ialah PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 3% dari DPP
3.	Bagaimana proses perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Hutama Karya?	Dihitung dengan mengalikan tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 3% lalu dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
4.	Bagaimana proses pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Hutama Karya?	Pemotongan dilakukan oleh pihak pengguna jasa karena berstatus sebagai pemotong pajak dan dilakukan saat melakukan pembayaran

5.	Bagaimana proses penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Utama Karya?	Penyetoran dilakukan oleh pihak pengguna jasa yaitu PKN STAN dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukannya pemotongan
6.	<p>Bagaimana proses pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Utama Karya?</p> 	Pelaporan dilakukan setelah dokumen-dokumen kelengkapan sudah diberikan oleh pengguna jasa atau PKN STAN seperti Bukti Pembayaran dan Bukti pemotongan. Batas waktu pelaporan adalah 20 hari setelah bulan dilakukan penyetoran pajak. Untuk pelaporan sudah menggunakan sistem e-Filing. Dalam melaporkan pajak kita selalu tepat waktu, baik dari pembayaran uang muka hingga pembayaran termin 3 karena pengguna jasa membagikan dokumen-dokumen kelengkapan yang dilampirkan tepat waktu.
7.	Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Utama Karya?	Jika terjadi kesalahan kesalahan pemotongan maka akan dilakukan perbaikan SPT dan menyetorkan kekurangan pajaknya
8.	Apa sanksi yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2	Jika terjadi keterlambatan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal

	pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Utama Karya?	jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa denda bunga telat bayar sebesar 2% dari jumlah pajak terutang
9.	Apa sanksi yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pelaporan pajak pada Proyek Pembangunan Gedung PKN STAN oleh PT. Utama Karya?	Jika terjadi keterlambatan pelaporan pajak bila pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100,000,-



Lampiran 14: Flow Proses PPN dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2



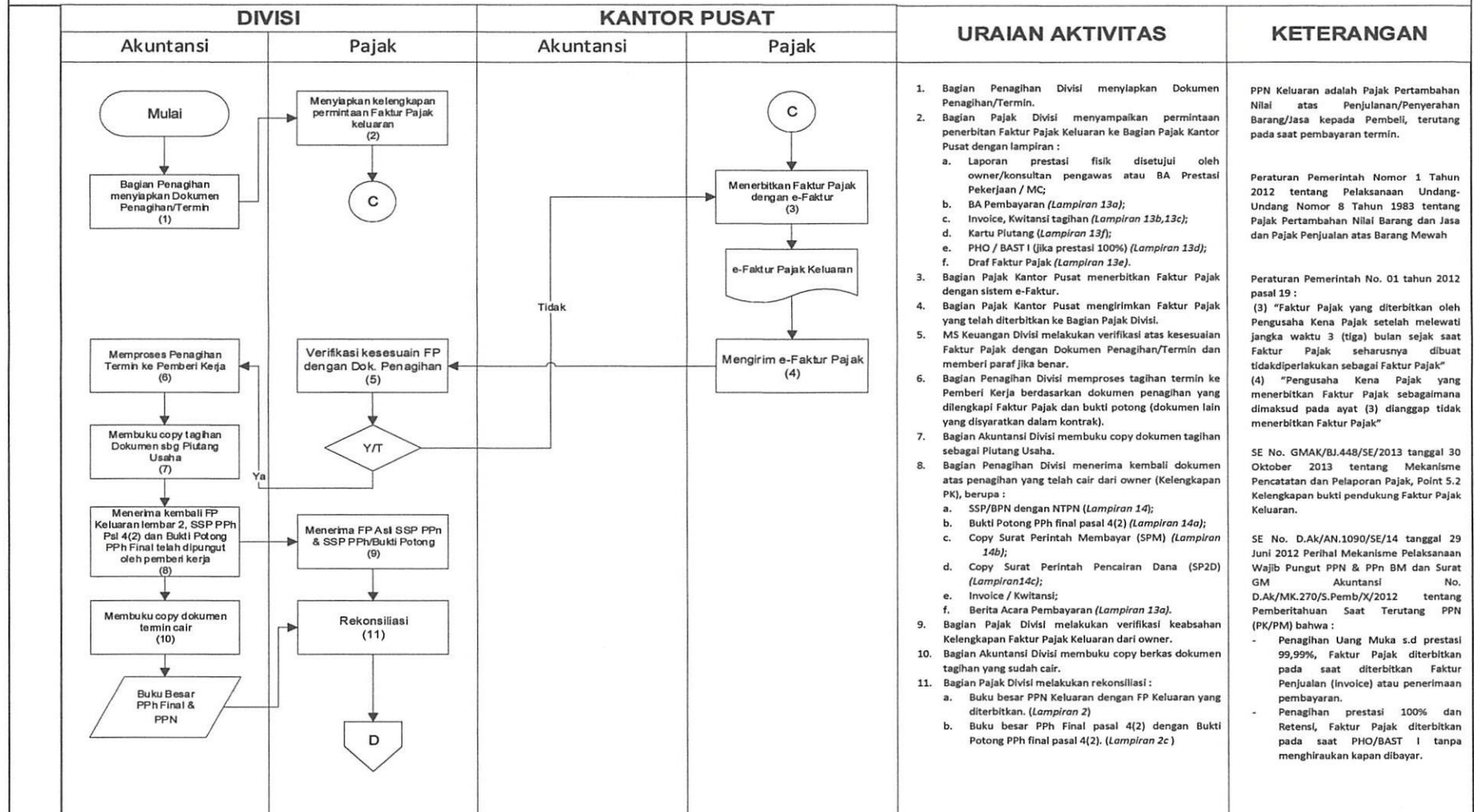
PROSEDUR
PENGELOLAAN PAJAK

No. Dokumen : AK/PJK/P/008 Rev. 2

Tanggal Terbit : 27/11/2018

Halaman : 8 dari 18

FLOW PROSES
PPN KELUARAN DAN PPH FINAL PASAL 4 (2) ATAS TERMIN/PENJUALAN



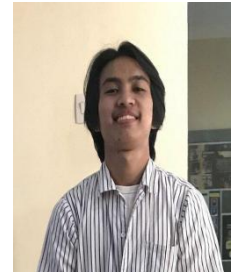
FLOW PROSES
PPN KELUARAN DAN PPH FINAL PASAL 4 (2) ATAS TERMIN/PENJUALAN

DIVISI		KANTOR PUSAT		URAIAN AKTIVITAS	KETERANGAN
Akuntansi	Pajak	Akuntansi	Pajak		
	<p style="text-align: center;">D</p> <p>Membuat daftar rekapitulasi kelengkapan PPN Keluaran (12)</p> <p>MS Keuangan memeriksa dan menandatangani rekap kelengkapan PPN Keluaran (13)</p> <p>Mengirim rekap & data pendukung ke Kantor Pusat (14)</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>Rekap Tanda Terima dari KP diterima kembali oleh Divisi (16)</p>		<p style="text-align: center;">E</p> <p>Menerima verifikasi, mengembalikan rekap tanda terima pengiriman Faktur PK & PPh Pasal 4(2) (15)</p> <p>PPH Pal 4(2) Fina & Faktur Pajak Keluaran</p> <p>Menyimpan berkas kelengkapan PPN Keluaran (17)</p> <p>Membuat SPT Masa PPN (18)</p> <p>Mengajukan tanda tangan untuk SPT ke Direktur Keuangan (19)</p> <p>Lapor SPT ke KPP (20)</p> <p>Membuat Opname penerbitan & kelengkapan permintaan Pajak Keluaran (21)</p> <p style="text-align: center;">Selesai</p>	<p>12. Bagian Pajak Divisi membuat rekapitulasi Daftar Kelengkapan Pajak Keluaran yang akan dikirim ke Kantor Pusat.</p> <p>13. MS Keuangan memeriksa dan menandatangani Rekap Daftar Kelengkapan Pajak Keluaran yang dibuat.</p> <p>14. Bagian Pajak Divisi mengirim Berkas dan Daftar Kelengkapan Pajak Keluaran ke Bagian Pajak Kantor Pusat.</p> <p>15. Bagian Pajak Kantor Pusat menerima, verifikasi Berkas Kelengkapan Pajak Keluaran dari Divisi dan mengembalikan Daftar Tanda Terima ke Divisi yang telah dinyatakan valid.</p> <p>16. Bagian Pajak Divisi menerima Daftar tanda terima dari Bagian Pajak Kantor Pusat.</p> <p>17. Bagian Pajak Kantor Pusat menyimpan Berkas Kelengkapan Pajak Keluaran jadi satu dengan Berkas permintaan penerbitan Faktur Pajak.</p> <p>18. Bagian Pajak Kantor Pusat membuat SPT PPN Masa 1111 dalam program e-Faktur (Lampiran 7), diperiksa oleh MS Pajak dan Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan.</p> <p>19. Mengajukan tanda tangan ke Pengurus Perusahaan (Direktur Keuangan) atas SPT Masa.</p> <p>20. Bagian Pajak Kantor Pusat melaporkan SPT Masa tersebut ke KPP Wajib Pajak Besar Empat.</p> <p>21. Bagian Pajak Kantor Pusat membuat Daftar Opname penerbitan dan kelengkapan pajak Keluaran.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 14/PJ/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4 (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti pemotongan/ pemungutannya.</p> <p>Pengiriman data pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>Laporan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.</p>

Lampiran 15: CV

Naufal Hafidh Al Aliyya

Magelang Jawa Tengah, 56512 · 18312247@students.uii.ac.id · (+62) 81-217-920-048



About Me

An undergraduated accounting student at Islamic University of Indonesia. A highly determined individual, quick adapting, and a passionate person. Eager to learn new things and up to any challenges. Equally good in individual and team work

Education

Islamic University of Indonesia

Indonesia

Bachelor of Accounting, CGPA 3.48 out of 4.00

present

ACCA Diploma in Financial Accounting

Yogyakarta,

2018 –

20

21

Senior High School 1 of Magelang

Indonesia

Science Major

2018

Jawa Tengah,

2015 –

Skills & Interest

Technical : Microsoft Office, Accounting, Data Analysis, Event Management, Adaptability, Time Management, Team Work, SAP S/4HANA.

Language : Bahasa Indonesia (Native) and English.

Interest : Sport and Adventure

Related Competency

Pass Exam for Financial Accounting (F3) 2021	March
ACCA Course present	2019 –
Business Process Integration 2020 Certified completed the course on Business Process Integration Configuration with SAP S/4HANA From July to December 2020	Jul – Dec
Enterprise Resources Planning 2020 Certified completed the course on Introduction to SAP S/4HANA using GBI From February to July 2020	Feb – Jul

